

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Persyaratan khusus pemberian pembebasan bersyarat yang diatur dalam Pasal 43A dan Pasal 43B Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena pengetatan syarat ini diadakan dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat dan tetap memperhatikan hak asasi dari narapidana tindak pidana korupsi tersebut. Pengetatan persyaratan pemberian pembebasan bersyarat ini tidak berarti menghapus hak narapidana tindak pidana korupsi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.
2. Dasar pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana Hartati Murdaya yang melakukan tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi persyaratan khusus adalah narapidana tersebut telah memenuhi syarat umum untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yaitu telah menjalankan 2/3 masa pidananya dan telah membayarkan pidana denda yang dikenakan dan dengan memperhatikan keadaan LAPAS yang kelebihan kapasitas. Selain itu faktor usia dan kesehatan juga menjadi pertimbangan diberikan pembebasan bersyarat. Pemberian pembebasan bersyarat kepada Siti Hartati Murdaya lebih ditekankan pada faktor kemanusiaan karena apabila secara obyektif Siti Hartati

Murdaya tidak memenuhi syarat untuk diberikan pembebasan bersyarat karena Hartati Murdaya tidak pernah dinyatakan sebagai *justice collaborator*.

## **B. Saran**

Berdasarkan penulisan skripsi ini, maka saran yang dapat diberikan penulis terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagai yang berkewenangan untuk memberikan pembebasan kepada narapidana untuk dapat lebih objektif memutuskan apakah narapidana tersebut sudah memenuhi syarat umum dan syarat khusus untuk mendapatkan pembebasan bersyarat atau belum dan tidak mengabaikan PP No. 99 Tahun 2014 sebagai peraturan perundang-undangan yang secara teknis mengatur tentang pemberian pembebasan bersyarat.
2. Diharapkan kepada Pemerintah bersama dengan para Ahli Hukum untuk mengkaji-ulang Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan agar sesuai dengan keadaan yang ada sekarang, serta perlunya penyempurnaan dalam hal pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi sehingga tujuan negara untuk memberantas korupsi dapat tercapai.
3. Bagi masyarakat diharapkan dapat secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah mengenai pengaturan persyaratan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi.

4. Bagi masyarakat diharapkan untuk turut aktif berperan dalam pengawasan apabila terdapat pelaksanaan peraturan yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi.